

PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA (BKAD) MINAHASA SELATAN

Erika Trivosa Moku¹, Florence Moroki², Aprili Bacilius³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

email: erykamokalu14@gmail.com

Abstrak: Studi ini berfokus pada pengkajian pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan, serta pengaruh kombinasi penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan di Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pemanfaatan data primer. Subjek penelitian ini adalah pegawai dari BKAD Kabupaten Minahasa Selatan. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah non probability sampling. Jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 33 pegawai yang bekerja di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi, dan sektor yang berhubungan dengan isu keuangan di BKAD Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil dari pengujian hipotesis secara parsial mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan memberikan dampak positif dan signifikan bagi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Minahasa Selatan, serta kemudahan akses terhadap laporan keuangan juga memberikan dampak yang positif dan berarti bagi akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah tersebut. Hasil dari pengujian hipotesis secara bersamaan menunjukkan bahwa penyajian serta kemudahan akses pada laporan keuangan saling berkontribusi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

Abstract : *This study focuses on the assessment of the influence of financial statement presentation on financial management accountability, the influence of financial statement accessibility on financial management accountability, and the influence of the combination of financial statement presentation and accessibility on financial management accountability in the Finance and Asset Agency (BKAD) of South Minahasa Regency. The type of research used in this study is a quantitative approach with the use of primary data. The subjects of this study were employees of the BKAD of South Minahasa Regency. The sampling method applied was non-probability sampling. The number of samples taken for this study was 33 employees working in the budget, treasury, assets, accounting, and sectors related to financial issues in the BKAD of South Minahasa Regency. The results of partial hypothesis testing indicate that financial statement presentation has a positive and significant impact on accountability in financial management in South Minahasa, and ease of access to financial statements also has a positive and significant impact on financial management accountability in the region. The results of simultaneous hypothesis testing indicate that presentation and ease of access to financial statements contribute mutually to accountability in financial management in South Minahasa Regency.*

Keywords: *Financial Statement Presentation, Financial Statement Accessibility, and Financial Statement Accountability.*

PENDAHULUAN

Akuntansi publik adalah suatu sistem pembukuan yang diterapkan oleh institusi pemerintah untuk melaporkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Isu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara terkait erat dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan negara. Sasaran dari PP No. 71 Tahun 2010 adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dipengaruhi dengan baik oleh penyampaian laporan keuangan. Kepatuhan total terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan penyajian laporan keuangan yang komprehensif memungkinkan pengendalian

serta pengawasan pengelolaan keuangan dengan akurat. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak memengaruhi aksesibilitas terhadap laporan keuangan. Hal ini bisa terjadi karena akses pada laporan keuangan pemerintah masih terkendala. Selain itu, media massa dan situs web tidak banyak memberikan informasi mengenai laporan keuangan pemerintah di setiap daerah. . Bukti empiris menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan kemudahan akses terhadap laporan keuangan secara bersamaan berpengaruh besar pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penyampaian laporan keuangan daerah yang bertanggung jawab merupakan salah satu cara nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan daerah (Shadrina & Hidajat, 2023).

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai potensi ekonomi serta tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2021 telah disiapkan secara memadai, dalam semua aspek yang signifikan, dan kondisi keuangan pemerintah per 31 Desember 2021 pada umumnya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, BPK menemukan beberapa kekurangan dalam laporan keuangan, termasuk manajemen kas yang kurang teratur dan akuntabilitas penggunaan dana BOS yang tidak terstruktur dengan baik. Di tahun anggaran 2023, BPK memberikan penilaian positif tanpa syarat terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Antara tahun 2021 hingga 2023, pemerintah kabupaten harus menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kinerja finansialnya, seperti dampak dari pandemi COVID-19, kebijakan fiskal, dan fokus pembangunan (Wawolangi et al., 2025).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya dinilai dari keakuratan angka di dalam laporan, tetapi juga dari cara laporan itu disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan seberapa sederhana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Karena itu, penelitian ini menekankan peran strategis Badan Keuangan dan Aset (BKAD) sebagai pionir dalam pengelolaan keuangan di Minahasa Selatan.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan interaksi antara pihak yang memberi mandat (prinsipal) dan pihak yang menerima tugas (agen) dalam melaksanakan kewajiban. Dalam konteks organisasi publik, entitas seperti masyarakat, pemerintah pusat, DPRD, atau penyedia dana berfungsi sebagai prinsipal, sedangkan organisasi atau pengelola keuangan publik berperan sebagai agen. Dikatakan bahwa hubungan ini dapat memicu konflik, karena agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Perbedaan kepentingan ini menciptakan yang disebut sebagai "masalah keagenan", yang diperburuk oleh ketidaksetaraan informasi, di mana agen memiliki akses informasi yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang bisa diwujudkan dengan memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dirancang dengan baik, tepat, dan jelas dapat menurunkan tingkat ketidakseimbangan informasi. Selain itu, dengan tersedianya laporan keuangan untuk publik atau pihak yang berkepentingan akan meningkatkan pengawasan dari luar, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari agen. (Jensen & Meckling, 1976).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk memberikan laporan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada

pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Untu, Manengkey & Bacilius, 2022).

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab untuk menjelaskan dan menjawab mengenai kinerja serta tindakan individu, entitas hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berhak meminta penjelasan tersebut. Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003, akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban untuk merespons dan memberikan penjelasan tentang tindakan dan kinerja individu atau badan hukum, atau pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau otoritas untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penerapan undang-undang otonomi harus mampu meningkatkan inovasi pemerintah untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas kepada DPRD serta masyarakat umum.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Tiap-tiap individu pada tiap-tiap klasifikasi bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*) (Pulu, Moroki & Tala, 2022).

Sam, Haliah, dan Kusumawati (2024) menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan komponen utama dalam penerapan pengelolaan yang efektif di sektor pemerintahan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melainkan juga mencakup mutu pengelolaan anggaran, efisiensi program, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas dalam sektor publik bertransformasi dari sekadar fokus administratif menjadi orientasi yang didasarkan pada hasil kinerja. Dalam pengalaman keuangan, akuntabilitas terdiri dari:

- Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum : Kepatuhan terhadap aturan hukum.
- Akuntabilitas Proses : Prosedur pelaksanaan tugas yang benar.
- Akuntabilitas Program : Pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
- Akuntabilitas Kebijakan : Pertanggungjawaban atas pilihan kebijakan yang diambil.

Peyajian Laporan Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan unit pemerintah pengelola anggaran memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem akuntansi serta menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. BPKAD sebagai pengelola anggaran wajib melakukan pencatatan akuntansi terkait transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk juga transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan belanja di bawah tanggung jawabnya. Ini berarti bahwa setiap BPKAD diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dari unit kerjanya. Jenis laporan keuangan yang wajib disusun oleh masing-masing unit kerja meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Siregar, Kawulur & Moroki, 2021).

Laporan keuangan ini dikirimkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai landasan bagi penyusunan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah tersebut merupakan kombinasi dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPKAD dalam lingkup pemerintahan daerah. Berdasarkan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 24, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang berkaitan

dengan posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama periode pelaporan tertentu (Ratuwalangon, Tangkau & Moroki, 2023)

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang dicapai. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) untuk diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Kemudian dijelaskan pada ayat (3), LKPD tersebut diserahkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pengawasan Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah selesai diaudit oleh BPK maka Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum. Penyajian laporan keuangan mengacu pada bagaimana informasi keuangan disusun dan ditampilkan dalam laporan formal (Neraca, LRA, LAK, dll) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator penyajian yang baik meliputi:

- Relevansi : Informasi mampu mempengaruhi keputusan pengguna.
- Andal : Bebas dari pengertian yang menyesatkan.
- Dapat Dibandingkan : Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Dapat Dipahami : Kemudahan bagi pengguna untuk mengerti maksud informasi.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas informasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan informasi oleh pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan informasi dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain itu, penggunaan media elektronik juga dapat mempermudah penyampaian serta pemahaman informasi bagi pengguna.

Aksesibilitas informasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pemanfaatan informasi oleh pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan informasi dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Selain itu, penggunaan media elektronik juga dapat mempermudah penyampaian serta pemahaman informasi bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat aksesibilitas suatu informasi, maka semakin besar kemungkinan informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas (Kmur, Sumual & Bacilius, 2024).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2021), aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan dapat diakses oleh publik secara terbuka, tepat waktu, dan mudah dipahami sebagai bagian dari prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara/.Indikator aksesibilitas meliputi :

- Keterbukaan : laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah disebarluaskan secara terbuka melalui media massa.
- Kemudahan : pemerintah perlu mempermudah pihak terkait dalam mengakses informasi mengenai laporan keuangan.
- Aksesibilitas : masyarakat bisa mengunduh laporan keuangan pemerintah lewat internet (situs web).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif asosiatif untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel.

Lokasi penelitian ini adalah kantor Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Subjek penelitian (populasi) adalah seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Total Sampling* atau sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, yaitu sebanyak 33 orang responden.

Teknik Pengolahan Data

Data diproses menggunakan software statistik (SPSS) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengujian Kualitas Data : Uji Keabsahan (korelasi Product Moment) dan Uji Konsistensi (Cronbach Alpha).

Pengujian Asumsi Klasik : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis : Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t (Parsial), Uji F (Simultan), dan Koefisien Determinasi R².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden terdiri dari 33 pegawai yang sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) dan telah bekerja lebih dari 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menjawab alat penelitian.

Metode analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengetahui dampak dari variabel independen, yaitu Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), terhadap variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y).

Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	7,064	2,007			3,520	0,001
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,481	0,088	0,546		5,469	0,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,546	0,122	0,449		4,491	0,000

Sumber: Data primer hasil olahan

Berdasarkan tabel diketahui model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=7,064 + 0,481X1 + 0,546X2 + e$$

Pada rumus regresi yang disebutkan sebelumnya, konstanta (Y) yang bernilai 7,064 menunjukkan bahwa jika variabel independen tetap, maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan meningkat sebesar 7,064. Koefisien (X1) pada variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai regresi sebesar 0,481, yang berarti setiap peningkatan satu unit akan menyebabkan kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,481. Nilai koefisien (X2) untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,546 menunjukan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan maka akan menaikkan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,546.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	7,064	2,007			3,520	0,001
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,481	0,088	0,546		5,469	0,000

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	0,546	0,122	0,449	4,491	0,000
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Sumber: Data primer hasil olahan

Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Hasil analisis uji t untuk variabel penyajian laporan keuangan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,469 > t_{tabel} 2,042 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Hasil analisis uji t untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,491 > r_{tabel} 2,042 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 maka H2 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	389,227	2	194,614	166,739	.000 ^b
Residual	35,015	30	1,167		
Total	424,242	32			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 166,739 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai F_{hitung} jauh lebih besar dari F_{tabel} (3,32), maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, penyajian dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di BKAD Minahasa Selatan.

Analisis Koefisien Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	0,917	0,912	1,080

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X1)

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Y)

Sumber: Data primer yang diolah

Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah 0,912. Hal ini menunjukkan kekuatan model yang sangat tinggi, di mana variabel-variabel yang diteliti mampu menjelaskan fenomena akuntabilitas sebesar 91,2%.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperkuat teori keagenan. Ketika BKAD Minahasa Selatan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai SAP, hal tersebut memberikan keyakinan kepada publik bahwa anggaran dikelola dengan benar. Lebih lanjut, kemudahan akses (seperti melalui website pemma) membuat pengawasan masyarakat menjadi lebih efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa transparansi informasi adalah kunci utama dari

akuntabilitas publik. Di BKAD Minahasa Selatan, integrasi antara sistem informasi keuangan yang baik dan keterbukaan informasi telah menciptakan iklim kerja yang lebih bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penyampaian laporan keuangan memiliki peranan penting dalam memperkuat akuntabilitas. Semakin baik cara penyajian laporan, semakin besar rasa tanggung jawab yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Kemudahan akses informasi keuangan menjadi elemen yang sangat penting. Adanya data yang mudah diakses akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BKAD. Secara keseluruhan, kedua elemen ini berperan penting dalam membangun budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan Minahasa Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021. https://www.bpk.go.id/assets/files/annual_report/2022/annual_2021_1650942056.pdf
- F Pulu, F Moroki, O Tala - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2022, Analisis Penerapan Tax Amnesty Jilid I di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2394>
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–60. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kmur, G., Sumual, F. M., & Bacilius, A. (n.d.). TEHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KAIMANA. 2(3), 137–147. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/135>
- N Ratuwalangon, J Tangkau, F Moroki - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2023, Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Perbendaharaan Negara. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/3717>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencakup berbagai hal terkait pengelolaan keuangan negara.
- RM Siregar, AF Kawulur, FO Moroki - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2021, Analisis Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No. 14 pada Toko Blessing's. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/1012>
- Sam, A.A.R., Haliah Haliah & Andi Kusumawati. (2024). Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 3(1 SE-Economics and Accounting). <https://ijerfa.afdifaljournal.com/index.php/ijerfa/article/view/245>
- Shadrina H. N.Hidajat S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Ekonomis: *Journal of Economics and Business* (2023) ,10.33087/ekonomis.v7i1.873 <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>
- Silvina Untu, James Manengkey, April Bacilius, 2022, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK*



RUMAH KOS DI KELURAHAN TATAARAN PATAR. <https://ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/2847>

Wawolangi, S. G. V., Morasa, J., & Tirayoh, V. Z. (2025). Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/10.58784/rapi.270>